
PERJUANGAN MULTIKULTURALISME PERHIMPUNAN INDONESIA TIONGHOA DALAM PERSPEKTIF REKOGNISI AXEL HONNETH

Rustono Farady Marta

Ilmu Komunikasi, Universitas Bunda Mulia

Disetujui 26 Februari 2018

ABSTRACT

Social equality among human beings is the ideal condition that has been initiated by philosophers such as Hegel and Mead, but Axel Honneth offers a different perspective on both implementation levels and a more holistic perspective. One of the thoughts related to the acquisition of Honneth's recognition through his postulate, has illustrated that there is a struggle on the basis of awareness of respect and recognition of cultural identity in the realm of multiculturalism. In the struggle there are several steps that must be passed to obtain mutual recognition of the particular identity, where the working principle starts from the affective level of love, then the cognitive is in the realm of the legal order, until the intellectual intuition is poured in the form of solidarity. These three become forms of reciprocal relationships that lead to the acquisition of recognition in several stages in every phase of society's development. This is in line with the struggle of the Chinese Association of China (INTI) which is always at the forefront of diffusing the implementation of multiculturalism to the wider community. Recognition of the equal rights and obligations of citizens is an essential human role, as well as the ethnic Chinese Indonesian community that has become an integral and fundamental part of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). Unfortunately, past political policies 'scratch' history track record that actually creates a negative perception related to the existence of this ethnic.

Keywords: *Axel Honneth Recognition, Multiculturalism, Perhimpunan INTI*

ABSTRAK

Pemikiran Rekognisi Axel Honneth melalui postulasinya bahwa terdapat perjuangan pemerolehan rekognisi (*the struggle for recognition*), dimana prinsip kerjanya lebih didasarkan atas: cinta (*love*), tatanan hukum (*legal order*), dan solidaritas (*solidarity*). Hal ini sejalan dengan perjuangan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) yang senantiasa berada di garis terdepan mendifusikan implementasi dari multikulturalisme pada masyarakat luas. Pengakuan akan kesetaraan hak dan kewajiban warga negara merupakan sesuatu peranan manusia yang sifatnya hakiki, demikian pula masyarakat etnis Tionghoa Indonesia yang telah menjadi bagian integral serta fundamental dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sayangnya kebijakan politik masa lampau 'menggoreskan' rekam jejak sejarah yang justru menimbulkan persepsi negatif terkait keberadaan etnis ini.

Kata kunci: Rekognisi Axel Honneth, Multikulturalisme, Perhimpunan INTI

*Korespondensi Penulis:

E-mail: rustonofarady@gmail.com

PENDAHULUAN

Teori-teori sosial sampai akhir dekade 1980-an seolah-olah 'didominasi' oleh dua pendekatan intelektual besar, yakni Marxisme di Eropa dan teori keadilan John Rawls di Amerika Serikat. Di dalam kedua teori itu tatanan politis haruslah diatur berdasarkan prinsip-prinsip normatif yang tegas dan jelas. Semua bentuk ketidaksetaraan atau ketidakadilan sosial haruslah dilenyapkan. Akan tetapi sejalan dengan perkembangan jaman, fokus filsafat politik kini tampaknya telah berubah arah. Jika dahulu filsafat politik dominan dengan ide-ide dasar tentang 'distribusi yang transparan dan setara' (*equal distribution*) dan 'kesetaraan ekonomis' (*economic equality*), maka sekarang ide-ide yang dominan adalah ide-ide yang berkaitan dengan 'penghormatan' (*respect*) dan 'martabat' (*dignity*). Hal inilah yang disebut oleh Nancy Fraser sebagai perubahan dari 'redistribusi' (*redistribution*) menuju ke 'pengakuan' (*recognition*). Sementara konsep yang pertama terkait dengan visi tentang keadilan yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan sosial dalam hal redistribusi kebutuhan-kebutuhan mendasar setiap orang sebagai subyek yang bebas, maka konsep kedua, yakni konsep tentang pengakuan, lebih ingin menciptakan masyarakat yang adil sebagai masyarakat yang mengenali identitas personal partikular setiap individu yang ada.

Di dalam sejarah filsafat Hegel dan Mead adalah para pemikir yang mencoba merumuskan ide ini secara komprehensif. Jika Hegel masih memiliki nuansa metafisis yang kuat di dalam pemikirannya, Mead justru ingin mengembangkan etika politik pengakuan post-metafisika. Akan tetapi lepas dari perbedaan mendasar tersebut, mereka merumuskan suatu bentuk masyarakat ideal yang kurang lebih serupa, yakni suatu masyarakat di mana kesetaraan antara individu telah menjadi bagian integral interaksi sosial, sehingga setiap individu dapat diakui, dikenali, dan didorong untuk menjadi individu-individu yang unik.

Dalam rangka memaknai perubahan pemahaman ini menurut Honneth, kita dapat menggunakan dua kerangka berpikir yang dimungkinkan untuk diterapkan. Walaupun kedua kerangka berpikir itu memang pada hakekatnya bertentangan. Kerangka pertama memungkinkan kita berpikir bahwa semua konsep-konsep kontemporer, seperti martabat dan pengakuan, sebenarnya adalah hasil dari kekecewaan politis (*political disillusionment*). Konsep ini disebut demikian karena telah menjadi simbol kemenangan partai-partai politik konservatif di banyak negara. Akibatnya banyak kebijakan-kebijakan yang tadinya berbasis negara kesejahteraan yang berfokus pada kesetaraan sosial pun terkikis sedikit demi sedikit. Argumennya begini karena realisasi keadilan dan kesetaraan sosial adalah sesuatu yang membutuhkan waktu lama dan usaha yang besar, maka cita-cita yang lebih realistis, yakni peningkatan penghormatan dan pengakuan terhadap identitas personal partikular, dapatlah didahulukan.

Ada alternatif kerangka berpikir kedua, yakni munculnya tema-tema seperti penghormatan dan pengakuan sebagai tanda dari bertumbuhnya kepekaan moral masyarakat. Dengan argumen ini sebenarnya mau dikatakan bahwa masyarakat telah bergerak ke arah kesadaran tentang pentingnya penghormatan dan pengakuan terhadap identitas kultural yang selama ini terabaikan. "Sebagai konsekuensi", demikian tulis Honneth, "kita jadi menyadari bahwa pengakuan terhadap martabat individu dan kelompok membentuk pemahaman kita tentang keadilan secara vital". Inilah yang kiranya menjadi argumen utama Axel Honneth di dalam pandangannya tentang politik pengakuan di dalam multikulturalisme.

Perjuangan Pemerolehan Rekognisi

Axel Honneth adalah seorang filsuf dan teorikus sosial. Ia lahir di Essen, Jerman Barat pada tanggal 18 Juli 1949, dan menjalani studinya di Bonn, Bochum,

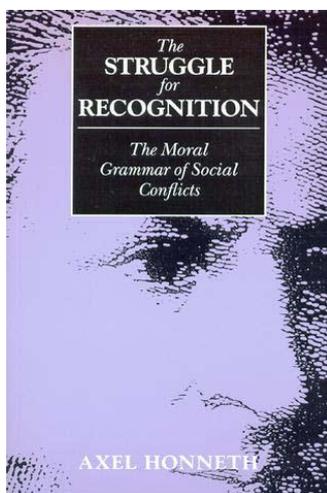
Berlin, dan Munich. Di Munich dia berada di bawah bimbingan langsung dari Jürgen Habermas dan mengajar di Free University of Berlin dan New School sebelum pindah ke Johann Wolfgang Goethe-Universitas dari Frankfurt pada tahun 1996. Pada 2001 ia menjadi Direktur *Institute for Social Research* yang sering juga dikenal sebagai Mazhab Frankfurt yang bertempat di Universitas Frankfurt.

Tulisan-tulisan Honneth berfokus pada filsafat moral dan filsafat politik, terutama dalam konteks hubungan antara kekuasaan, pengakuan, dan penghormatan. Salah satu argumen yang kiranya menjadi inti dari banyak tulisannya adalah prioritas terhadap hubungan intersubyektif dan pengakuan di dalam relasi-relasi sosial. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi ataupun politik belaka, tetapi juga berkaitan dengan identitas personal individu.

Karya awal Honneth berjudul *The Critique of Power: Reflective Stages in a Critical Social Theory* hendak melihat kaitan antara refleksi-refleksi sosial Teori Kritik Mazhab Frankfurt dengan teori Michel Foucault tentang kekuasaan. Karya keduanya berjudul *The Struggle for Recognition: Moral Grammar of Social Conflicts*. Di dalam buku ini, seperti akan

dijelaskan kemudian, Honneth menggunakan perjuangan pemerolehan rekognisi atau pengakuan (*struggle for recognition*) dalam arti yang digunakan oleh Hegel. Honneth juga banyak menggunakan teori yang dikembangkan oleh George Herbert Mead, seorang psikolog sosial. Pengaruh teori komunikasi yang dikembangkan Habermas juga sangat terasa di dalam karya-karya Honneth. Dengan belajar dari para pemikir ini ia kemudian merumuskan teori kritisnya sendiri.

Di dalam filsafat Kant konsep ‘penghormatan’ memperoleh tempat tertinggi, yakni sebagai dasar dari imperatif kategoris, terutama bahwa orang lain haruslah diperlakukan selalu sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Akan tetapi menurut Honneth baru Hegellah yang nantinya memberikan tempat kunci bagi konsep pengakuan. Konsep pengakuan selalu menjadi bayang-bayang di dalam filsafat moral sebelumnya, tertutup oleh konsep-konsep lainnya yang lebih ditekankan. Jika konsep penghormatan, terutama setelah filsafat moral Kant banyak menjadi acuan, sudah memiliki arti yang jelas, konsep pengakuan belumlah memiliki arti yang definitif, baik di dalam bahasa sehari-hari maupun di dalam filsafat itu sendiri.



Gambar 1. Halaman Muka Buku Karya Axel Honneth
Sumber: <https://mitpress.mit.edu/books/struggle-recognition>

Di dalam filsafat Hegel relasi antara kesadaran diri dan pengakuan timbal balik tidaklah langsung dan linier. Haruslah ada semacam kategori ketiga di antara kedua konsep tersebut. Oleh karena itu Hegel kemudian merumuskan sebuah konsep yang cukup baru pada waktu itu untuk ditelaah kembali oleh Honneth, yakni konsep “perjuangan untuk mendapatkan pengakuan” (*the struggle for recognition*). Konsep ini ingin menjelaskan bagaimana subyek berkembang melalui tahap-tahap. Di setiap tahapnya tuntutan akan pengakuan terus meningkat, dan kemudian dimediasikan melalui proses pengakuan timbal balik dengan subyek-subyek lainnya. Dengan proses inilah subyek memperoleh pengakuan penuh atas identitas personal partikularnya.

Apa yang kiranya sangat menarik dari Hegel adalah kemampuannya untuk memetakan tiga bentuk pengakuan timbal balik. Bentuk pertama dari pengakuan timbal balik adalah cinta. Menurut Hegel di dalam cinta, dua subyek saling mengakui dan menerima satu sama lain, sehingga mereka bisa sampai pada titik kenyamanan eksistensial dan emosional yang diartikulasikan di dalam sentuhan maupun hubungan fisik. Sementara di level negara, pengakuan mengambil bentuk segala sesuatu yang memungkinkan subyek mengakui dan mengenali kualitas dan identitas satu sama lain, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi bagi proses reproduksi tatanan sosial. Proses perubahan dari cinta ke level pengakuan di tingkat negara terjadi melalui proses perjuangan, konflik, yang secara perlahan namun pasti bergerak ke semakin berkembangnya penerimaan terhadap identitas personal subyek. Penerimaan semacam itu hanya mungkin, jika pengakuan dipahami sebagai sesuatu yang terus meluas dan berubah dalam tegangan.

Kaitan antara moralitas dan pengakuan baru sungguh-sungguh tampak, jika pengalaman negatif, seperti ketidakadilan, dijadikan sebagai titik tolak refleksi. Di dalam pengalaman negatif ada suatu unsur di dalam diri manusia tidak lagi

diakui. Inilah yang disebut sebagai luka moral (*moral injury*). Dari sudut pandang ini suatu luka fisik menjadi luka moral, jika korban yang mengalaminya sebagai “suatu tindakan yang secara sengaja hendak menyangkal aspek-aspek utama dari keutuhan kepribadiannya”.

Ada tiga tipe penghinaan (*disrespect*). Yang pertama adalah tipe penghinaan fisik. Ambil contoh misalnya berbagai tragedi dan penghinaan yang dialami seseorang, seperti penyiksaan ataupun pemerkosaan. Bagi Honneth kedua bentuk tindakan negatif ini adalah bentuk yang paling radikal dan fundamental dari penghinaan. Sebabnya adalah karena kedua tindakan ini hanya menempatkan manusia sebagai daging dan darah, sekaligus merendahkan status otonominya sebagai manusia. Untuk menanggapi ini manusia perlu membangun sebuah relasi yang memungkinkan ia meraih kembali kehormatan dan harga dirinya. Relasi inilah yang disebut Hegel sebagai cinta, di mana individu mampu mendapatkan kenyamanan eksistensial dan emosionalnya melalui hubungan positif dengan orang lain.

Tipe penghinaan kedua adalah apa yang disebut Honneth sebagai “penyangkalan hak-hak dan eksklusi sosial, dimana manusia merasa terlanggar martabatnya dengan tidak diberikan hak-hak moral dan tanggung jawab legal penuh di dalam komunitasnya.” Untuk menanggapi masalah ini dibutuhkan proses pengakuan timbal balik, di mana setiap individu dapat dianggap sebagai subyek yang memiliki hak dihadapan individu lainnya. Inilah yang disebut oleh Mead sebagai proses pengambilan perspektif “yang lain yang umum”, yang menjamin bahwa setiap orang dipandang sebagai individu yang setara oleh individu lainnya.

Bentuk penghinaan ketiga yang dijabarkan Honneth mencakup semua tindakan yang tidak mengakui nilai-nilai partikular kelompok-kelompok sosial tertentu. Akibatnya subyek tidak lagi mampu menentukan jalan dan cara hidupnya sendiri, melainkan harus menyesuaikan diri sepenuhnya dengan

mayoritas. Untuk menanggapi ini politik pengakuan haruslah mengambil bentuk penciptaan relasi-relasi positif, sehingga individu bisa diterima di dalam lingkaran solidaritas sosial, dan dihargai sepenuhnya dalam konteks keunikan cara hidup maupun kemampuannya. Di dalam lingkup masyarakat semacam itu individu akan dapat menemukan penerimaan dan penghargaan atas individualitas mereka. “Karena subyek”, demikian tulis Honneth tentang hal ini, “di dalam pemahaman diri praktis mereka, haruslah memastikan status mereka, baik sebagai entitas otonom sekaligus individual, mereka haruslah, lebih jauh, mengambil perspektif dari yang lain yang umum”. Dengan begitu setiap individu akan dikenali sebagai individu yang unik. Idealitas semacam ini hanya dapat terjadi, jika relasi di dalam masyarakat adalah relasi kesaling pengakuan antara individu-individu yang

berasal dari latar belakang yang sama maupun yang berbeda. Inilah yang disebut Honneth sebagai dimensi afektif yang terwujud di dalam solidaritas sosial.

Dampak positif dari penerapan politik pengakuan di atas adalah, bahwa setiap orang di dalam komunitas tertentu menemukan dirinya dihargai seturut dengan keunikan dan karakter spesifik mereka. Kondisi semacam itu memungkinkan pengembangan diri yang paling maksimal dari setiap orang. Untuk alasan ini relasi politik pengakuan yang dikaitkan dengan solidaritas akan menciptakan perbedaan-perbedaan yang bersifat setara. Artinya suatu komunitas memang terdiri dari beragam individu dengan latar belakang, penghayatan nilai, bakat-bakat, maupun keunikan-keunikan tertentu, tetapi semua perbedaan tersebut memiliki status yang setara, yakni dihargai dan dikenali sebagai bagian integral dari seluruh komunitas.

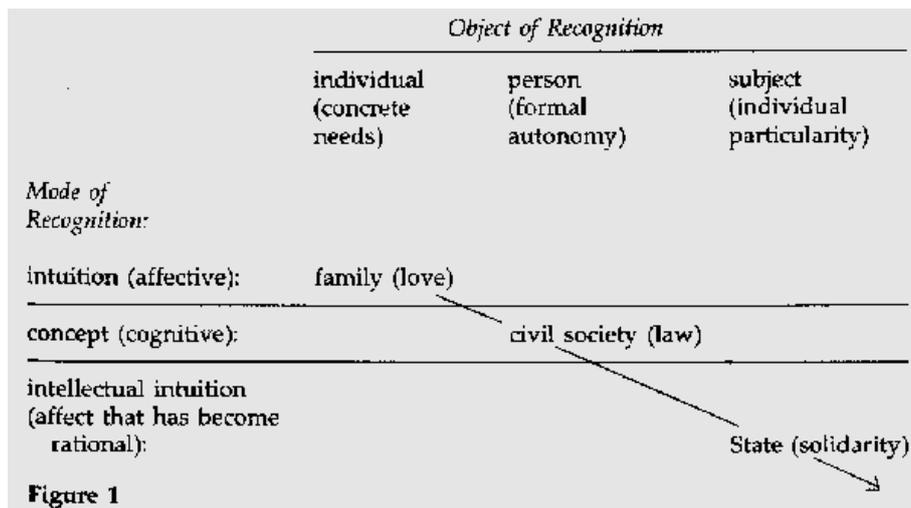


Figure 1

Gambar 2. Bentuk Rekognisi Pemikiran Axel Honneth

Sumber: <https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/honneth.htm>

Inilah tiga pola di dalam politik pengakuan yang ingin diajukan oleh Honneth sebagai argumen utamanya, yakni cinta (*love*), tatanan hukum (*legal order*), dan solidaritas (*solidarity*). Dalam buku “The Pathologies of Individual freedom” Honneth yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Ladislaus Lob, Honneth

menuliskan “*taking these institutions into account, individuals are able to design their lives according to socially acknowledged aims and thus to experience life as meaningful.*”. yang bermakna bahwa setiap individu berhak merencanakan kehidupannya dan mengalami berbagai hal yang berguna serta membuatnya lebih

berarti, termasuk diantaranya adalah berhak memperjuangkan keunikan antar sesama dalam konteks multikulturalisme.

Kearifan Masyarakat Multikulturalisme

Multikulturalisme adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan-kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan tentang adanya keragaman, kebhinekaan, pluralitas, sebagai realitas utama dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem sosial-budaya, kebiasaan dan politik yang mereka anut. (Azra, 2007:10)

Pengakuan akan kesamaan derajat dari fenomena budaya yang beragam itu tampak dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ungkapan itu sendiri mengisyaratkan suatu kemauan yang kuat untuk mengakui perbedaan tapi sekaligus memelihara kesatuan atas dasar pemeliharaan keragaman, bukan dengan menghapuskannya atau mengingkarinya. Perbedaan dihargai dan dipahami sebagai realitas kehidupan, hal ini adalah asumsi dasar yang juga melandasi paham multikulturalisme. (Irhandayaningsih, 2012:5)

Kesadaran multikultur sebenarnya sudah muncul sejak Negara Republik Indonesia terbentuk. Pada masa Orde Baru, kesadaran tersebut dipendam atas nama kesatuan dan persatuan. Paham monokulturalisme kemudian ditekankan. Akibatnya sampai saat ini, wawasan multikulturalisme bangsa Indonesia masih sangat rendah. Ada juga pemahaman yang memandang multikultur sebagai eksklusifitas. Multikultur justru disalahartikan yang mempertegas batas identitas antar individu. Bahkan ada yang juga mempersoalkan masalah asli atau tidak asli.

Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural adalah multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara

kebudayaan. Dalam model multikulturalisme ini, sebuah masyarakat dilihat sebagai pemilik sebuah kebudayaan yang berlaku umum dan masyarakat tersebut umumnya memiliki corak seperti sebuah mozaik. Di dalam mozaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan yang seperti sebuah mozaik tersebut. Model multikulturalisme ini sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain apa yang dinamakan sebagai kebudayaan bangsa, sebagaimana yang terungkap dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi “Kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah”.

Gagasan multikulturalisme dinilai mengakomodir kesetaraan dan perbedaan sebagai sebuah konsep yang mampu meredakan konflik vertikal maupun konflik horisontal dalam masyarakat yang heterogen, dimana tuntutan akan pengakuan dan eksistensi dan keunikan budaya kelompok etnik sangat lumrah terjadi. Masyarakat multikultural diciptakan mampu memberikan ruang yang luas bagi berbagai identitas kelompok untuk melaksanakan kehidupan secara otonom, sehingga diharapkan dapat tercipta suatu sistem budaya dan tatanan sosial yang mapan dalam kehidupan masyarakat yang akan menjadi pilar kedamaian sebuah bangsa.

Pejuangan Perhimpunan INTI

Semangat multikulturalisme telah diakomodir dengan didirikannya Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) di Jakarta di hadapan Notaris James Herman Rahardjo pada 5 Februari 1999 oleh 18 Warga Negara Republik Indonesia yang peduli terhadap penyelesaian “Masalah Tionghoa”.

Perhimpunan INTI adalah organisasi yang bersifat kebangsaan sesuai semangat Mukadimah UUD RI 1945, bebas, egaliter, pluralis, inklusif,

demokratis, tidak bernaung atau mengikatkan diri kepada salah satu partai politik dan terbuka bagi semua Warga

Negara Indonesia yang setuju pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta tujuan Perhimpunan INTI.



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan Perhimpunan INTI

Sumber: <http://harian.analisadaily.com/kota/news/perhimpunan-inti-gelar-bakti-sosialdi-edan-denai/124282/2015/04/13>

Menyadari sepenuhnya bahwa “Masalah Tionghoa” di Indonesia merupakan warisan sejarah kolonial yang telah membebani perjalanan sejarah bangsa Indonesia selama ini. Perhimpunan INTI didirikan dengan tujuan menjadi organisasi yang maju, modern, bercitra internasional, berorientasi pada kebangsaan Indonesia, menghargai hak asasi manusia, egaliter, pluralis, inklusif, demokratis, dan transparan untuk berperan aktif dalam dinamika proses pembangunan bangsa (*nation building*), antara lain menyelesaikan “Masalah Tionghoa” di Indonesia, menuju terwujudnya kebangsaan Indonesia yang kokoh, rukun bersatu dalam keharmonisan, bhinneka, saling menghargai, dan saling percaya.

Perhimpunan INTI berkeyakinan usaha penyelesaian “Masalah Tionghoa” di Indonesia harus diletakkan di atas landasan usaha penyelesaian seluruh permasalahan nasional yang tengah dihadapi Bangsa dan Negara Indonesia; dan bahwa pengikutsertaan seluruh WNRI Keturunan Tionghoa secara menyeluruh, bulat, dan utuh adalah syarat mutlak penyelesaian

“Masalah Tionghoa” di Indonesia. Sejak dideklarasikan pada 10 April 1999 yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi-nya, per Februari 2007 telah terbentuk 12 Pengurus Daerah (tingkat Provinsi) dan 38 Pengurus Cabang (tingkat Kota atau Kabupaten) Perhimpunan INTI di seluruh Indonesia.

Konsep “perjuangan untuk mendapatkan pengakuan” (*struggle for recognition*) yang dicetuskan Honneth sangat sesuai dengan semangat Perhimpunan INTI terhadap pluralisme. Konsep tersebut menjelaskan bagaimana etnis Tionghoa di Indonesia berkembang melalui tahap-tahap, dimana tuntutan akan pengakuan sebagai bagian dari Bangsa Indonesia terus meningkat, dan kemudian dimediasikan melalui proses pengakuan timbal balik dari negara Republik Indonesia serta Warga Negara Indonesia dari Etnis lainnya. Dengan proses inilah subyek memperoleh pengakuan penuh atas identitas personal partikularnya.

Di level negara, pengakuan mengambil bentuk segala sesuatu yang memungkinkan subyek mengakui dan

mengenali kualitas dan identitas satu sama lain, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi bagi proses reproduksi tatanan sosial terjadi melalui proses perjuangan, konflik, yang secara perlahan namun pasti bergerak ke semakin berkembangnya penerimaan terhadap identitas personal subyek. Meskipun harus dibayar dengan harga yang mahal dalam bentuk pengalaman negatif, seperti ketidakadilan, luka moral (*moral injury*) seperti halnya peristiwa Mei 1998, dan pengakuan sebagai warga negara Indonesia begitu sulit diperoleh, namun hal tersebut dijadikan sebagai titik tolak refleksi.

Ada tiga (3) tipe penghinaan (*disrespect*) yang diperoleh etnis Tionghoa, antara lain: Tipe yang pertama adalah penghinaan fisik, yaitu tragedi kerusuhan Mei 1998, kejadian pembakaran, penyiksaan, penjarahan, pengrusakan, dan pemerkosaan. Bagi Honneth bentuk tindakan negatif ini adalah bentuk yang paling radikal dan fundamental dari penghinaan. Dalam menanggapi ini sebagian etnis Tionghoa merasakan perlunya membangun sebuah relasi yang memungkinkan mereka meraih kembali kehormatan dan harga dirinya melalui pendirian Perhimpunan INTI. Relasi inilah yang disebut Hegel sebagai cinta, di mana individu mampu mendapatkan kenyamanan eksistensial dan emosionalnya melalui hubungan positif dengan orang lain.

Model Kedua dari penghinaan adalah apa yang disebut Honneth sebagai “penyangkalan hak-hak dan eksklusi sosial, dimana manusia merasa terlanggar martabatnya dengan tidak diberikan hak-hak moral dan tanggung jawab legal penuh di dalam komunitasnya”. Hal ini pernah dialami oleh etnis Tionghoa melalui status kewarganegaraannya, dimana kartu identitas mereka harus mencantumkan “Non Pribumi” di era Orde Baru. Hak-hak sebagai warga negara Indonesia dibatasi melalui keterbatasan akses-akses terhadap fasilitas publik, namun kewajiban membayar pajak tetap harus dipenuhi. Solusi yang diperlukan untuk menanggapi masalah ini dibutuhkan proses pengakuan

timbang balik, dimana etnis Tionghoa melalui Perhimpunan INTI berusaha meningkatkan eksistensi mereka sebagai subyek yang memiliki hak dihadapan individu lainnya. Inilah yang disebut oleh Mead sebagai proses pengambilan perspektif “yang lain yang umum”, yang menjamin bahwa setiap orang dipandang sebagai individu yang setara oleh individu lainnya.

Hal ketiga yang dicetuskan Honneth mencakup semua tindakan yang tidak mengakui nilai-nilai partikular etnis Tionghoa, dimana tradisi serta kebudayaan yang dimiliki tidak boleh diekspresikan atau dirayakan. Sebut saja tradisi Imlek, Barongsai, penggunaan Bahasa Mandarin, dan masih banyak lainnya yang dibelenggu selama Orde Baru. Perhimpunan INTI menanggapi ini dengan mengambil bentuk penciptaan relasi-relasi positif, sehingga etnis Tionghoa bisa diterima di dalam lingkaran solidaritas sosial, dan dihargai sepenuhnya dalam konteks keunikan cara hidup maupun kemampuannya.

SIMPULAN

Perhimpunan INTI melalui berbagai gerakan sosialnya mengacu pada tiga pola di dalam teori pengakuan yang ingin diajukan oleh Honneth sebagai argumen utamanya, yakni cinta (*love*), tatanan hukum (*legal order*), dan solidaritas (*solidarity*), maka dapat disimpulkan bahwa etnis Tionghoa melalui Perhimpunan INTI sebagai organisasi yang mampu memberi pengakuan individu. Individu sebagai bagian dari etnis Tionghoa berusaha dibangun relasi serta kesamaan hak dan solidaritasnya untuk memperoleh pengakuan dari individu-individu lain sebagai sesama warga negara Indonesia.

Perjuangan yang dilakukan etnis Tionghoa melalui Perhimpunan INTI menyiratkan apa yang tertulis dalam buku “The Pathologies of Individual freedom” oleh Honneth, bahwa setiap individu berhak merencanakan kehidupannya dan mengalami berbagai hal yang berguna serta

membuatnya lebih berarti, termasuk diantaranya adalah berbagi dengan sesama dalam konteks perjuangan multikulturalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, A. (2010). Recognizing Domination: Recognition and Power in Honneth's Critical Theory. *Journal of Power*, Vol.3 (1): 21-32.
- Coppel, Charles A. (1994). *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*. Cetakan Kedua. Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah PSH. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Fraser, Nancy, dan Axel Honneth. (2003). *Redistribution or Recognition?: A Political-Philosophical Exchange*. New York: Verso.
- Hainsworth, Geoffrey B., dan Bakti Setiawan. (2000). *Socioeconomic and Political Conditions in Indonesia after Political Downfall of Soeharto in 1998*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- <http://harian.analisadaily.com/kota/news/pe-rhimpunan-inti-gelar-bakti-sosial-di-medan-denai/124282/2015/04/13>
- <https://mitpress.mit.edu/books/struggle-recognition>
- <https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/honneth.htm>
- Honneth, Axel. (2004). Organized Self-Realization Some Paradoxes of Individualization, *European Journal of Social Theory*. Vol.7(4): 463-478.
- _____ (2010). *The Pathologies Of Individual Freedom: Hegel's Social Theory*. Jerman: Princeton.
- Petherbridge, Danielle. (2011). *Axel Honneth: Critical Essay: With a Reply by Axel Honneth*. Leiden: Brill Academic Publishers.
- _____ (2013). *The Critical Theory of Axel Honneth*. Plymouth: Lexington Books.